KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2014: DPR Tetap Mengacu pada Hasil Audit BPK
Tanggal : Rabu, 02 September 2015
Surat Kabar : Suara Pembaruan
Halaman : A7

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2014

DPR tetap Mengacu pada Hasil Audit BPK

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 menjadi Undang-undang dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, kemarin. DPR RI menyoroti pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dalam masa transisi pemerintahan ini.

Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan didampingi Agus Hermanto menerima Pendapat Akhir Pemerintah tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2014.

WAKIL Ketua DPR RI Taufik Kurniawan menegaskan, dalam membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) pada tahun anggaran berikutnya, DPR tetap mengacu pada hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun sebelumnya. Termasuk dalam pembahasan RAPBN 2016, DPR mempertimbangkan hasil audit BPK pada pelaksanaan APBN 2014.

"DPR juga tetap memperhatikan faktor penyerapan anggaran Kementerian dan Lembaga (K/L). Pada prinsipnya, DPR setuju dengan sistem *reward and punishment* dalam evaluasi anggaran tahun 2014 terkait hasil pemeriksaan BPK," kata Taufik, usai memimpin rapat paripurna.

Pada tahun anggaran 2014, terdapat 85 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) yang diaudit dan diberikan opini oleh BPK. Dari 85 LKKL, sebanyak 62 di antaranya mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), 17 mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan 7 lainnya mendapat opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP). Sementara Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) mendapat opini WDP, masih sama dengan opini tahun 2013.

Politikus F-PAN itu mengakui, tidak mudah untuk mempertahankan kinerja penyerapan anggaran K/L. Sehingga tak dipungkiri, ada K/L yang sampai dua tahun berturut-turut mendapatkan opini TMP. Taufik melihat, kondisi ekonomi kekinian yang tidak bersahabat juga turut mempengaruhi. Termasuk pengaruh manajerial, persoalan birokrasi, atau penggunaan anggaran dari pemerintahan sebelumnya.

"Permasalahan setiap K/L itu berbeda. Kami juga melihat kinerja setiap K/L itu mencerminkan kemampuan masing-masing menteri yang memimpin. Tapi ini juga harus menjadi perhatian pemerintah. Harus ada upaya supaya serapan anggaran tetap baik meskipun pada masa transisi," imbuhnya.

Politikus asal daerah pemilihan Jawa Tengah itu menegaskan, K/L yang berturut-turut mendapat opini TMP tentu harus mendapat perhatian. Tentunya, terhadap hal itu harus dicari solusi yang terbaik.

"Konkretnya nanti ada pada pembahasan anggaran masing-masing K/L. Apakah kemudian anggarannya akan dikurangi oleh pemerintah atau tidak, tentu akan diputuskan setelah melalui dinamika pembahasan," katanya.

Taufik juga mengingatkan agar pemerintah tidak tergesa-gesa menaikkan anggaran bagi kementerian yang tidak mampu memperbaiki kinerjanya. Pasalnya, tidak mungkin menambah anggaran kepada K/L yang memiliki laporan keuangan yang buruk. Dikhawatirkan, penambahan anggaran itu justru malah membebani.

"Rapor jelek kementerian akan menjadi pertimbangan yang sangat spesifik. Meski demikian, DPR tidak akan serta merta menurunkan anggaran terhadap kementerian bersangkutan. Tapi ini semua sesuai keputusan pemerintah karena mereka yang menentukan. DPR hanya menyetujui," tukasnya.

Taufik juga menggarisbawahi, dalam kurun waktu 6 tahun ini, DPR memperoleh opini WTP dari BPK. Dalam aspek akuntabilitas publik, berarti DPR telah memenuhi pemeriksaan auditor negara. "Tentu hal ini tidak mudah dicapai," imbuhnya.

MONITOR PENYERAPAN ANGGARAN

Dalam Rapat Paripurna ini, Wakil Ketua Badan Anggaran, Jazilul Fawaid juga membacakan laporan Hasil Pembicaraan Tingkat I atas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2014. Dalam pendapat akhir mini fraksi yang dibacakan Jazilul, Fraksi Partai Golkar mendesak pemerintah untuk melakukan perbaikan pengelolaan negara, terutama menyangkut permasalahan yang mempengaruhi kewajaran LKPP 2014.

"Disamping itu, masih terlihat temuan BPK yang merupakan pengulangan dari temuan BPK tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan pemerintah kurang memiliki *sense of crisis* karena tidak menindaklanjuti temuan BPK sejak penyimpangan ditemukan," kata Jazilul.

Sementara, Fraksi Partai Gerindra menilai bahwa pelaksanaan anggaran tahun 2014 seperti dalam laporan LKPP tidak sejalan dan belum bisa memenuhi target dan gagal mengantisipasi serta mengatasi pengaruh eksternal terhadap kinerja anggaran. Kegagalan itu memperburuk fundamental ekonomi yang membuat Rupiah terus melemah, dan menjadikan beban hidup masyarakat semakin berat.

Fraksi Partai Demokrat meminta pemerintah tetap mengambil langkah terstruktur dalam penyajian informasi SDA dan terus melakukan inventarisasi serta penilaian asset secara komprehensif di seluruh K/L teknis. Adapun Fraksi PAN meminta pemerintah menerapkan punishment bagi K/L yang mendapatkan opini TMP selama dua tahun berturut-turut.

Dan, Fraksi PDI Perjuangan merekomendasikan agar dilakukan pendalaman mengenai regulasi terkait dengan mekanisme dan pemanfaatan dana USO Kemenkominfo serta evaluasi terhadap BP3TI. Selain itu, pemerintah harus mempersingkat birokrasi pencairan anggaran dan revisi DIPA terutama belanja modal dengan tujuan agar belanja negara dapat diserap maksimal oleh K/L maupun Pemda.

Lebih lanjut Jazilul menyatakan, dari Pembahasan Tingkat I, maka Banggar sepakat agar pemerintah meningkatkan kualitas laporan keuangan terutama terhadap LKPP, LKBUN, dan LKKL yang masih mendapatkan opini audit WDP atau TMP. Pemerintah juga diminta menindaklanjuti rekomendasi BPK dalam laporan hasil pemeriksaan atas LKPP 2014.

"Pemerintah harus memonitor penyerapan anggaran secara maksimal dengan tetap berpedoman pada prinsip efisien, ekonomis, dan efektif," tambah Jazilul.

Jazilul menambahkan, pemerintah diminta menerapkan dan menyusun statistik keuangan pemerintah yang mengacu pada Manual Statistik Keuangan Pemerintah sehingga dapat menyajikan konsolidasi fiskal dan statistik keuangan pemerintah.

Sementara itu, dalam pendapat akhir pemerintah, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan bahwa pemerintah telah dan akan terus konsisten berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan negara.

Pemerintah juga akan melakukan perbaikan terhadap pencatatan aset tetap, penyempurnaan sistem akuntansi hibah, perbaikan pengelolaan rekening pemerintah, peningkatan kualitas SDM, dan peningkatan komitmen para menteri/pimpinan lembaga untuk melakukan pengelolaan keuangan yang baik, serta peningkatan kualitas LKKL. **(sf)**

DPR JUGA TETAP MEMPERHATIKAN FAKTOR PENYERAPAN ANGGARAN KEMENTERIAN DAN LEMBAGA (K/L). PADA PRINSIPNYA, DPR SETUJU DENGAN SISTEM REWARD AND PUNISHMENT DALAM EVALUASI ANGGARAN TAHUN 2014 TERKAIT HASIL PEMERIKSAAN BPK.

Taufik Kurniawan Wakil Ketua DPR RI

Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan didampingi Agus Hermanto saat memimpin Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2014.